

Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

* **Muthiah Nada Syahrani¹, Ranggi Ade Febrian²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : muthiahnadasyahrani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan masyarakat pengguna JPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan telah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan revitalisasi, koordinasi antarinstansi, dan pengawasan kondisi JPO. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan JPO, serta kerusakan fasilitas akibat kurangnya pemeliharaan dan vandalisme. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pemerintahan daerah, khususnya terkait pengelolaan infrastruktur keselamatan transportasi perkotaan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Revitalisasi, JPO, Infrastruktur Publik.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Transportation Department of Pekanbaru City in the revitalization of Pedestrian Overpasses (JPO) and identify the factors inhibiting its implementation. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Transportation Department, Regional Revenue Agency, Civil Service Police Unit, and community members. The results indicate that the Transportation Department has carried out its role through policy implementation, revitalization programs, inter-agency coordination, and supervision of pedestrian overpasses. However, several obstacles remain, including budget limitations, low public awareness of using JPO facilities, and infrastructure deterioration caused by inadequate maintenance and vandalism. This study contributes to the development of local government studies, particularly in the management of urban transportation safety infrastructure.

Keywords: Local Government, Transportation Department, Revitalization, Pedestrian Overpass, Public Infrastructure.

PENDAHULUAN

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) merupakan salah satu fasilitas publik yang disediakan pemerintah untuk menjamin keselamatan pejalan kaki dalam melakukan aktivitas penyeberangan jalan. Keberadaan JPO sangat penting terutama pada ruas jalan dengan volume kendaraan yang tinggi karena berfungsi mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas serta menciptakan ketertiban dalam penggunaan ruang jalan. Selain sebagai sarana keselamatan, JPO juga menjadi bagian dari infrastruktur transportasi perkotaan yang mendukung mobilitas masyarakat secara aman dan nyaman.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan, kebutuhan terhadap fasilitas penyeberangan yang memadai semakin meningkat. Namun dalam praktiknya, banyak JPO yang mengalami penurunan kualitas akibat faktor usia bangunan, kurangnya pemeliharaan, vandalisme, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas publik. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi JPO sebagai sarana keselamatan pejalan kaki menjadi kurang optimal. Fenomena serupa juga terjadi di Kota Pekanbaru, dimana beberapa

JPO mengalami kerusakan fisik dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan jasa yang terpusat pada ruas-ruas jalan utama menyebabkan tingginya intensitas lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki. Oleh karena itu, keberadaan JPO menjadi salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk menunjang keselamatan pengguna jalan. Namun berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan sejumlah JPO yang mengalami kerusakan pada bagian tangga, lantai, pagar pengaman, pencahayaan, serta fasilitas pendukung lainnya sehingga memerlukan revitalisasi.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, terdapat beberapa JPO yang tersebar di ruas jalan utama Kota Pekanbaru yang menjadi prioritas pemeliharaan dan revitalisasi.

Tabel 1.

Sebaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Pekanbaru

No	Lokasi JPO	Kondisi
1	Jalan Jenderal Sudirman	Memerlukan revitalisasi
2	Jalan Tuanku Tambusai	Memerlukan pemeliharaan
3	Jalan HR Soebrantas	Memerlukan revitalisasi
4	Jalan Arifin Ahmad	Pemeliharaan berkala
5	Jalan Riau	Memerlukan perbaikan fasilitas

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan JPO di Kota Pekanbaru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan melakukan berbagai upaya revitalisasi guna meningkatkan fungsi, keamanan, dan kenyamanan fasilitas penyeberangan bagi masyarakat. Revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan fisik bangunan, tetapi juga melibatkan proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, pemeliharaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Meskipun demikian, pelaksanaan revitalisasi JPO masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain keterbatasan anggaran daerah, kerusakan fasilitas yang cukup berat, kurang optimalnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga fasilitas JPO. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang memilih menyeberang langsung di badan jalan dibandingkan menggunakan JPO sehingga tujuan pembangunan fasilitas tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki seseorang atau organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Peran tersebut dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu peran sebagai norma, peran sebagai perilaku individu, dan peran sebagai struktur. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang pengelolaan infrastruktur transportasi perkotaan, serta menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan efektivitas revitalisasi dan pemeliharaan JPO di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan beberapa lokasi JPO yang menjadi objek revitalisasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, staf terkait, pihak Bapenda, Satpol PP, serta masyarakat pengguna JPO. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto yang terdiri atas peran sebagai norma, peran sebagai perilaku individu, dan peran sebagai struktur. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung maupun masyarakat pengguna JPO.

1. Peran sebagai Norma

Peran sebagai norma berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan aturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku. Dalam revitalisasi JPO, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjalankan kegiatan revitalisasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai instansi teknis bidang transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi diawali dengan proses perencanaan yang dilakukan secara sistematis. Tahapan tersebut meliputi identifikasi kondisi JPO, penyusunan desain rehabilitasi, perhitungan kebutuhan material dan tenaga kerja, hingga pengajuan anggaran melalui APBD.

Pelaksanaan revitalisasi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan urgensi perbaikan masing-masing fasilitas. Dari hasil observasi diketahui bahwa beberapa JPO yang telah direvitalisasi mengalami peningkatan kualitas fisik berupa perbaikan tangga, lantai jembatan, pagar pengaman, serta struktur bangunan yang lebih kokoh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi telah dilakukan sesuai prosedur dan standar teknis yang ditetapkan. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, peran sebagai norma menuntut organisasi menjalankan fungsi sesuai aturan yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melaksanakan revitalisasi berdasarkan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur pemerintahan sehingga indikator peran sebagai norma dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik.

2. Peran sebagai Perilaku Individu

Peran sebagai perilaku individu berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pada penelitian ini, indikator tersebut meliputi pengawasan, tindakan teknis, pelayanan, dan perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan JPO. Dalam aspek pengawasan, Dinas Perhubungan melakukan pemantauan kondisi JPO secara berkala untuk mengetahui kerusakan fasilitas dan menentukan kebutuhan perbaikan. Pengawasan dilakukan terhadap kondisi struktur bangunan, kelengkapan fasilitas keselamatan, kebersihan, serta keamanan lingkungan sekitar JPO. Melalui kegiatan pengawasan tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas revitalisasi berdasarkan tingkat kerusakan yang ditemukan. Pada aspek tindakan teknis, Dinas Perhubungan melakukan berbagai kegiatan perbaikan fisik seperti rehabilitasi tangga, pengecatan ulang, perbaikan lantai, pemasangan pagar pengaman, dan peningkatan kualitas struktur bangunan. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan dan ketersediaan anggaran daerah. Dari aspek pelayanan, revitalisasi JPO memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna JPO merasakan peningkatan kenyamanan dan keamanan setelah revitalisasi dilakukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya Dinas Perhubungan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, indikator peran sebagai perilaku individu telah dijalankan melalui aktivitas pengawasan, tindakan teknis, dan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pengguna JPO.

3. Peran sebagai Struktur

Peran sebagai struktur menggambarkan bagaimana organisasi menjalankan tugas dan fungsinya melalui pembagian kewenangan, koordinasi, dan tanggung jawab kelembagaan. Dalam revitalisasi JPO, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki kedudukan sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana dan prasarana transportasi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi JPO tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah, serta pihak ketiga sebagai pelaksana teknis pekerjaan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung proses pengawasan, pengamanan aset, penertiban aktivitas di sekitar JPO, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam aspek sosial, revitalisasi JPO memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat menyeberang jalan. Keberadaan JPO yang layak digunakan mampu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan mendukung mobilitas masyarakat pada kawasan dengan aktivitas yang tinggi.

Dalam aspek pemerintahan, Dinas Perhubungan melaksanakan fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan, pemeliharaan, dan evaluasi terhadap fasilitas JPO. Kewenangan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan transportasi. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, organisasi yang mampu menjalankan fungsi dan koordinasi secara efektif menunjukkan bahwa peran struktural telah berjalan dengan baik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Perhubungan telah menjalankan fungsi strukturalnya melalui koordinasi lintas instansi dan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki.

Adapun Faktor Penghambat Revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebagai berikut :

1. Keterbatasan Anggaran

Faktor penghambat utama dalam revitalisasi JPO adalah keterbatasan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pembiayaan revitalisasi bersumber dari APBD sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan program lain yang juga menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah. Informan menjelaskan bahwa revitalisasi dilakukan secara bertahap karena keterbatasan alokasi anggaran dan adanya prioritas pembangunan lainnya. Keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan revitalisasi tidak dapat dilakukan secara serentak pada seluruh JPO yang membutuhkan perbaikan. Akibatnya, masih terdapat beberapa fasilitas yang belum memperoleh penanganan optimal.

2. Koordinasi dan Kesadaran Masyarakat

Hambatan berikutnya berasal dari aspek koordinasi dan perilaku masyarakat. Meskipun revitalisasi telah dilakukan, masih ditemukan masyarakat yang enggan menggunakan JPO dan memilih menyeberang langsung di badan jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas masih perlu ditingkatkan. Selain itu, keberadaan aktivitas yang tidak sesuai fungsi pada area JPO juga memengaruhi kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan masyarakat dalam menjaga fungsi fasilitas publik.

3. Hambatan Teknis

Hambatan teknis menjadi faktor yang cukup dominan dalam revitalisasi JPO. Beberapa JPO memiliki kondisi struktur yang sudah tua, mengalami korosi, kerusakan berat, serta membutuhkan metode perbaikan khusus. Selain itu, ketersediaan material tertentu juga menjadi kendala dalam pelaksanaan revitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan teknis berpengaruh terhadap kualitas dan kecepatan pelaksanaan revitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan teknis yang matang agar proses revitalisasi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan fasilitas yang aman serta nyaman bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam revitalisasi JPO secara umum telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan fungsi normatif melalui perencanaan dan penganggaran, fungsi perilaku melalui pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat, serta fungsi struktural melalui koordinasi dan pembagian kewenangan antarinstansi. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan peran ditentukan oleh kemampuan melaksanakan norma, perilaku, dan struktur secara seimbang.

Namun demikian, keberhasilan revitalisasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kendala teknis pada fasilitas yang mengalami kerusakan berat. Oleh karena itu, revitalisasi JPO perlu dipandang sebagai proses berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemeliharaan, pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Huberman, A. Michael, M., & Miles, Matthew B. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, Lexy J.. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2024). *Data Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Kota Pekanbaru*. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2023). *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2023–2026*. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Teknis Fasilitas Keselamatan Pejalan Kaki*. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.